

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari teori demokrasi partisipatif yang peneliti rujuk dari David Held, demokrasi tidak hanya soal bebas dan setara, tetapi bagaimana meletakkan dasar yang tepat dalam mempertahankan dialog publik, suatu kondisi di mana berbagai isu-isu substantif mendapat lebih banyak kesempatan untuk dipertimbangkan, didiskusikan, dan diselesaikan. Untuk itu perlu dilihat bagaimana keterlibatan unsur-unsur masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan atau keputusan.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan ada beberapa hal yang tidak mendapatkan ruang lebih banyak untuk dipertimbangkan, didiskusikan, dan diselesaikan dalam penilaian Indeks Demokrasi Indonesia terhadap indikator-indikator penilaiannya. Seperti dalam penilaian kebebasan berkeyakinan Sumatera Barat yang merupakan provinsi dengan skor terendah dan satu-satunya yang masuk dalam kategori buruk. Salah satu faktor penyebab rendahnya penilaian kebebasan berkeyakinan di Sumatera Barat dikarenakan adanya aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya. Dari hasil penelitian maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya elit masyarakat tidak setuju dengan hasil IDI dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

1. IDI sebagai alat ukur demokrasi kurang sensitif lokalitas. Karena adanya aturan tertulis bernuansa agama boleh saja dan tidak akan merusak demokrasi selama aturan tersebut tidak berbenturan dengan aturan di atasnya, tidak membuat masyarakat merasa dibatasi kebebasannya, minoritas tidak diciderai haknya, dan masyarakat tidak dipaksa menjalankan agamanya. Seperti yang terjadi di Sumatera Barat, aturan tertulis bernuansa agama ini sesuai dengan falsafah hidup di Minangkabau. Aturan bernuansa agama merupakan hasil dari proses demokrasi masyarakat Sumatera Barat, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik organisasi, maupun kelompok agama.
2. Keterlibatan lembaga formal maupun elit masyarakat informal pemerintah dalam penghitungan skor IDI belum dilakukan secara maksimal. Salah satu bukti belum maksimalnya keterlibatan lembaga adalah tidak terlibatnya Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, LKAAM, Bundo Kandung dalam FDG yang dilakukan IDI. Padahal FKUB merupakan salah satu forum yang dibentuk oleh Kementerian Agama, yang didalamnya merupakan perwakilan dari setiap agama yang ada di Indonesia. Jika hendak melihat adanya deskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah, harusnya FKUB bisa menjadi salah satu sumber terpercaya dalam melihat bagaimana kondisi kebebasan beragama di Sumatera Barat. Sedangkan LKAAM dan Bundo Kandung merupakan lembaga masyarakat yang aktif dalam proses demokratisasi di Sumatera Barat. Peneliti juga melihat IDI kurang serius dalam melakukan sosialisasi program, hal ini terbukti dengan adanya beberapa

instansi yang belum mengetahui apa itu IDI, bahkan beberapa tercatat sebagai kelompok kerja IDI Sumatera Barat.

3. Adanya ketidaksamaan persepsi tentang aturan tertulis dan pernyataan pemerintah yang diskriminatif. IDI memaknai hasil dari demokrasi haruslah mewakili seluruh elemen masyarakat. Sedangkan menurut pemerintah Sumatera Barat, aturan tertulis ini sudah merupakan hasil dari proses demokrasi masyarakat Sumatera Barat. Pemerintah Sumatera Barat juga menilai tim IDI tidak konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan, dimana demokrasi berbicara tentang kesepakatan bersama dengan syarat tidak menyalahi aturan hukum dan tidak melanggar hak-hak masyarakat.
4. Peraturan daerah bernuansa agama dinilai tidak merusak demokrasi, hal ini disebabkan karena peraturan daerah bernuansa agama merupakan peraturan yang mengandung kondisi khas pada masyarakat di Sumatera Barat sesuai dengan undang-undang UU 12 tahun 2011, kemudian menurut UU 23 tahun 2014 peraturan daerah dapat menampung kondisi khas masyarakat. Kondisi khas masyarakat ini tidak hanya nilai-nilai keagamaan saja, ada kondisi sosial, ekonomi, dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat yang dapat diserap dan dijadikan peraturan daerah, sebab peraturan daerah nantinya akan mengatur hal yang lebih teknis lagi, karena ruang lingkup yang lebih kecil. Sehingga dengan mengadopsi kondisi khas ini nantinya akan lebih memudahkan masyarakat dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sebab sudah sesuai dengan kondisi masyarakat itu sendiri.

5. Dibutuhkan evaluasi terhadap indikator IDI, agar tercapainya tujuan IDI yang dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di suatu daerah. Pembahasan lebih lanjut ini bertujuan agar IDI lebih sensitif dengan kondisi daerah-daerah di Indonesia dan dapat mengkoordinir keberagaman yang ada di Indonesia, agar dapat meminimalisir penilaian tidak konsisten IDI. Meski begitu, kinerja dari kelompok kerja IDI daerah sendiri tergantung dukungan dari pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah memperoleh skor tinggi dan mendukung IDI, maka anggaran untuk pokja akan diperhatikan. Untuk daerah-daerah yang tidak setuju dengan penilaian IDI, seperti Sumatera Barat maka anggaran untuk pokja IDI tidak akan diperhatikan, sehingga kinerja dari pokja IDI tidak akan maksimal. Sedangkan rendahnya skor IDI dapat dibantu perbaikannya oleh pokja di daerah masing-masing.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas maka melalui penelitian ini, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada BPS, khususnya tim ahli IDI untuk melakukan kajian terhadap indikator IDI lebih lanjut lagi. Agar indikator IDI yang diharapkan dapat menggambarkan demokrasi di daerah dapat tercapai dan tidak menciderai nilai-nilai lokal di suatu daerah. Sehingga hasil dari IDI dapat dijadikan acuan oleh daerah untuk melakukan pembangunan politik khususnya demokrasi.

2. Diharapkan kepada BPS sebagai penyelenggara IDI lebih memperhatikan proses sosialisasi program IDI itu sendiri. Sebab IDI merupakan program pemerintah yang sudah berjalan kurang lebih 9 tahun. Jika penyelenggara pemerintah saja tidak tau apa itu IDI, maka IDI dapat dikategorikan program yang kurang produktif.
3. Diharapkan kepada BPS untuk lebih melibatkan elit masyarakat yang ada di daerah, karena dengan melibatkan banyak lembaga masyarakat yang diakui maka akan lebih detail gambaran yang akan didapatkan.
4. Diharapkan pemerintah daerah, khususnya Sumatera Barat dapat lebih berperan aktif dan memperhatikan bagaimana keberlangsungan IDI di provinsi Sumatera Barat. Meskipun penilaian IDI tidak berpengaruh besar terhadap daerah, namun ini tentu tidak baik jika dipertahankan.

